

HASIL PENELITIANANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEKUMUHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PESISIR TRADISIONAL(Studi Kasus : Desa Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi
Gorontalo)Dhea M. Damisi¹, Veronica A. Kumurur² & Rieneke L.E. Sela³¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi
^{2&3}Staf Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi

Abstrak. Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Di Indonesia hal paling kompleks yang timbul dari masalah permukiman ini yakni tumbuh dan menjamurnya kawasan permukiman–permukiman kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik itu kota maupun kabupaten. Keberadaan permukiman kumuh meskipun tidak dikehendaki namun harus kita akui bahwa, keberadaannya sulit untuk dihindari dalam perkembangan suatu wilayah baik kota maupun kabupaten. Kawasan permukiman tradisional Suku Bajo merupakan salah satu kawasan permukiman yang teridentifikasi sebagai permukiman kumuh. Kearifan lokal Suku Bajo pada umumnya yang hidup berdampingan dengan laut, untuk tetap menjaga kekayaan laut itu sendiri, tidak terlihat lagi di kawasan permukiman Suku Bajo Tilamuta. Prinsip hidup, kebudayaan, dan tradisi Suku Bajo yang perlahan luntur, terlihat di Suku Bajo Tilamuta karena tidak bisa menjaga ekosistem laut dan tidak berlaku ramah kepada laut yang menjadi pendamping hidup mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah (a)mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, (b)menganalisis faktor-faktor dominan kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder, analisis data, interpretasi hasil analisis sebagai penarikan kesimpulan. Metode analisis data, menggunakan analisis deskriptif dan skoring untuk mendeskripsikan eksisting lokasi penelitian dan untuk pemberian nilai terhadap sifat parameter yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan diperoleh bahwa faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Kecamatan Tilamuta yakni lokasi, kependudukan, kondisi bangunan hunian, kondisi prasarana dan sarana dasar, kondisi sosial ekonomi dan untuk faktor dominan kekumuhan yakni kondisi prasarana sarana dasar dan kondisi bangunan hunian.

Kata kunci: Pemukiman kumuh, Bajo, Tilamuta, Pemukiman Pesisir Tradisional

PENDAHULUAN

Permukiman pada umumnya merupakan suatu lingkungan hunian yang mempunyai fasilitas-fasilitas prasarana dan sarana didalamnya, untuk menunjang segala

kegiatan pemukim yang ada didalamnya. Namun yang banyak kita temui di Indonesia saat ini jauh dari apa pengertian permukiman itu sebenarnya. Terkait akan hal itu, berbagai masalah timbul dari sebuah permukiman. Di

Indonesia hal paling kompleks yang muncul dari masalah permukiman ini yakni tumbuh dan menjamurnya kawasan permukiman-permukiman kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik itu kota maupun kabupaten. Tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh disebabkan oleh berbagai hal seperti urbanisasi dan pertumbuhan penduduk (Doxiadis, 1968).

Meningktanya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak sebanding dengan adanya pembukaan lahan-lahan permukiman, oleh sebab itu banyak lahan-lahan yang tidak seharusnya untuk permukiman tapi dijadikan kawasan permukiman yang akhirnya terkategori dalam permukiman kumuh karena dibangun tanpa fasilitas yang seharusnya.

Permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang mengalami penurunan kualitas baik secara fisik maupun sosial, ekonomi, dan juga budaya masyarakat. Keberadaan permukiman kumuh meskipun tidak di kehendaki namun harus kita akui bahwa keberadaannya sulit untuk dihindari dalam perkembangan wilayah baik kota maupun kabupaten. Kantong-kantong kumuh semakin hari seakan merajalela disemua wilayah, seperti halnya di Provinsi Gorontalo yang masih tergolong sebagai provinsi baru. Dalam hal ini konsentrasi penelitian lebih kepada kabupaten Boalemo karena wilayah tersebut tergolong dalam wilayah dengan tingkat kepadatan yang rendah namun memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong lebih tinggi, dibandingkan wilayah-wilayah lain di Provinsi Gorontalo sehingga berpotensi besar dalam melahirkan lebih banyak kantong-kantong kumuh.

Kabupaten Boalemo memiliki letak pusat pemerintahan yang tidak jauh dari kawasan pesisir sehingga banyak kawasan permukiman tumbuh dan berkembang tersebar di wilayah pesisir. Salah satu kawasan permukiman pesisir yang memiliki daya tarik tersendiri dibanding kawasan permukiman lain yaitu kawasan permukiman suku Bajo yang letaknya berada dikawasan

pesisir kabupaten Boalemo. Kawasan permukiman suku Bajo termasuk dalam kategori permukiman tradisional yang memiliki karakter unik didalamnya baik dari bentuk rumah, sosial serta budaya penduduknya, contohnya seperti tinggal diatas air.

Berdasarkan observasi awal di Desa Bajo, kawasan permukiman tradisional ini memiliki ciri-ciri yang dikategorikan sebagai kawasan permukiman kumuh diantaranya seperti kondisi hunian yang tidak teratur, adanya kepadatan bangunan, serta kurangnya fasilitas-fasilitas umum untuk sebuah permukiman dengan berbagai permasalahan didalamnya. Padahal kawasan ini memiliki potensi untuk menjadi suatu objek wisata di Boalemo. Oleh sebab itu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kekumuhan di kawasan permukiman pesisir tradisional suku Bajo yang terletak di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Permukiman Kumuh

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Menurut UU No.1 Tahun 2011 pasal 1 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan bahwa kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011).

Menurut Bianpoen (1991) dalam Auliannisa. D (2009), lingkungan permukiman kumuh dapat digambarkan sebagai lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin dan hujan, lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur, bangunan sementara, tanpa perencanaan, prasarana kurang (MCK air bersih, saluran buangan, listrik, gang lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit), fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), mata pencaharian penghuni tidak tetap dan usaha non-formal, tanah bukan milik penghuni, pendidikan rendah, penghuni sering

atau dimensi seperti tingkat kepadatan dan keteraturan bangunan, kualitas bangunan, kondisi sarana dan prasarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Aspek dan kriteria kawasan permukiman kumuh seperti pada Tabel 1.

Kawasan Permukiman Pesisir

Pada dasarnya wilayah pesisir adalah wilayah yang merupakan tanda atau batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan (Kay dan Alder, 1999). Menurut Suprihayono (2007) wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara

Tabel 1. Identifikasi Faktor-faktor Kekumuhan Berdasarkan Indikator Kumuh

Aspek	Kriteria
Kondisi bangunan hunian	Keteraturan bangunan hunian
	Kepadatan bangunan hunian
	Kelayakan bangunan hunian
Kondisi aksesibilitas (Jalan Lingkungan)	Jangkauan jaringan jalan
	Kualitas jaringan jalan
Kondisi drainase	Kejadian genangan
Kondisi pelayanan air minum/Baku	Kualitas sumber air minum/Baku
	Kecukupan pelayanan air minum
Kondisi pengelolaan air limbah	Prasarana sanitasi lingkungan
Kondisi pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan lingkungan

Sumber: Draft Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Dirjen Cipta Karya-Kementrian PU (2014)

tidak tercatat sebagai warga setempat, rawan kebakaran, banjir dan rawan terhadap timbulnya penyakit.

Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan draft Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementrian PU, penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek

daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin.

Permukiman pesisir adalah suatu lingkungan hunian yang terletak di wilayah antara pertemuan daratan dan lautan yang didalamnya terdapat kegiatan penghidupan oleh kelompok pemukim tersebut yang

dominan memanfaatkan potensi di wilayah pesisir dalam pemenuhan kebutuhan.

Lingkungan permukiman di kawasan pesisir pada umumnya merupakan kawasan kumuh dengan tingkat pelayanan akan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang sangat terbatas, khususnya keterbatasan untuk memperoleh pelayanan sarana air bersih, drainase dan sanitasi, serta prasarana dan sarana untuk mendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Amir Mahmud, 2007). Menurut Satria (2004) dalam Ikhsani (2011), masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Lokasi

Pada aspek lokasi terdapat beberapa indikator untuk menentukan kekumuhan suatu lokasi kawasan permukiman. Indikator-indikator tersebut yakni legalitas tanah, status penguasaan bangunan, frekuensi bencana kebakaran, frekuensi bencana banjir, frekuensi bencana tanah longsor. Suatu lokasi dikatakan kumuh atau identik dengan kekumuhan dapat ditentukan berdasarkan penetapan nilai pada tiap indikator-indikator tersebut. Lokasi-lokasi yang identik dengan kekumuhan yakni permukiman di kawasan sepanjang bantaran sungai, di kawasan pesisir, diatas air, di bawah jembatan, di piggir rel kereta api.

Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan salah satu faktor yang erat hubungannya dengan suatu kekumuhan. Kependudukan dapat mempengaruhi kekumuhan disuatu kawasan permukiman berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan penambahan penduduk yang merupakan bagian dari indikator kekumuhan. Pertumbuhan penduduk adalah salah satu penyebab berkembangnya permukiman kumuh. Jika terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pembukaan lahan permukiman maka akan semakin banyak lahan-lahan yang tidak seharusnya dijadikan sebagai kawasan permukiman yang akhirnya terkategori sebagai permukiman kumuh.

Kondisi Bangunan

Kondisi bangunan dapat mempengaruhi kekumuhan suatu kawasan permukiman berdasarkan indikatornya yakni tingkat kualitas bangunan, tingkat kepadatan bangunan, tingkat kelayakan bangunan, dan tingkat penggunaan luas lantai. Jika kondisi bangunan di kawasan permukiman buruk, dengan nilai sangat tinggi pada masing-masing indikator kekumuhan, maka aspek kondisi bangunan tersebut akan teridentifikasi sebagai faktor kekumuhan.

Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar

Dalam identifikasi suatu kawasan permukiman kumuh, terdapat aspek kondisi sarana dan prasarana yang harus diperhatikan. Dalam hal ini terdapat beberapa indikator yakni tingkat pelayanan air bersih, kondisi sanitasi lingkungan, kondisi persampahan, kondisi saluran air hujan, dan kondisi jalan. Melalui indikator-indikator tersebut dapat ditentukan kekumuhan suatu kawasan permukiman dengan pemberian nilai pada tiap indikator kekumuhan.

Kondisi Sosial Ekonomi

Tinggi rendahnya kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi kondisi kekumuhan suatu kawasan permukiman. Tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan merupakan indikator yang terdapat pada aspek kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat akan menentukan kualitas dari suatu kawasan permukiman.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil survey lapangan yang dilakukan saat berada di kawasan permukiman Desa Bajo. Observasi dilakukan melalui cara pengamatan langsung di lokasi penelitian. Wawancara untuk mengumpulkan data secara langsung serta melalui kuisioner. Dokumentasi dengan cara merekam potret objek terkait dan aktifitas di kawasan permukiman Desa Bajo.

Untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo menggunakan metode analisis deskriptif sebagai gambaran terstruktur dalam identifikasi kawasan

permukiman. Faktor-faktor dominan kekumuhan kawasan permukiman Desa Bajo dapat ditentukan melalui cara pembobotan (*scoring*) dengan menentukan nilai tertinggi. Range nilai yang digunakan yakni 1-5. Bobot 5 diberikan untuk indikator yang menunjukkan nilai sangat tinggi, sedangkan bobot 3 diberikan untuk indikator dengan nilai tinggi, dan bobot 1 untuk indikator dengan nilai sedang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Kawasan Permukiman Desa Bajo Kecamatan Tilamuta

Permukiman adalah bagian dari lingkungan, sedangkan permukiman kumuh yaitu permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Ketentuan Umum Dalam UU No.1 Tahun 2011). Dalam hal ini kawasan permukiman Desa Bajo merupakan salah satu permukiman yang terkategori kumuh sebagai lokasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo adalah : Lokasi, kependudukan, kondisi bangunan hunian, kondisi prasarana dan sarana dasar, dan kondisi sosial ekonomi. Kelima aspek tersebut menjadi faktor penyebab kekumuhan di Desa Bajo karena berdasarkan analisis untuk identifikasi kawasan permukiman kumuh, kelimanya memiliki andil dalam setiap kekumuhan yang terjadi dari setiap indikatornya (Tabel 2).

Indikator-indikator dari setiap aspek pada sebaran nilai yang ada pada tabel 5, menunjukkan dengan jelas bahwa dari setiap indikator memiliki nilai sebagai faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Kecamatan Tilamuta.

Faktor-faktor Dominan Kekumuhan Kawasan Permukiman Desa Bajo Kecamatan Tilamuta

Kawasan permukiman Desa Bajo Tilamuta teridentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh, disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang telah dijelaskan

pada point sebelumnya. Namun dari faktor-faktor penyebab kekumuhan yang telah teridentifikasi itu, ada 2 (dua) faktor yang paling dominan sebagai penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Tilamuta berdasarkan karakter lokal masyarakat Bajo sebagai kawasan permukiman tradisional. Untuk mendapatkan faktor-faktor dominan yang tersebut, maka dilakukan teknik analisis skoring yang terurai melalui tabel berikut ini.

Berdasarkan hasil analisis, pada tabel 6 menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Tilamuta adalah kondisi prasarana sarana dasar dan kondisi bangunan hunian. Kedua faktor tersebut menjadi faktor dominan penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Tilamuta karena memiliki bobot tertinggi sebagai nilai kekumuhan berdasarkan indikator yang ada. Masing-masing memiliki total bobot yakni 23 untuk kondisi prasarana sarana dasar dan 16 untuk kondisi bangunan hunian.

Kondisi Prasarana dan Sarana Dasar

Lokasi permukiman masyarakat Bajo yang berada di atas permukaan laut atau di atas air merupakan sebab utama tidak maksimalnya penyediaan fasilitas prasarana dan sarana dasar di kawasan permukiman Desa Bajo khususnya untuk penyediaan air bersih.. Permukiman masyarakat Bajo yang berada di pesisir Boalemo, yang sedikit jauh dari keramaian kota atau pusat kota Boalemo, nampaknya merupakan salah satu sebab tidak terpenuhinya pelayanan air bersih di permukiman tersebut.

Kondisi Drainase di kawasan permukiman Desa Bajo juga tergolong sangat tinggi untuk indikator kekumuhan di Desa Bajo. Karakter lokal masyarakat Bajo yang dari dulunya hidup di atas laut tentunya tidak terikat dengan ada atau tidaknya fasilitas drainase, sehingga aspek drainase tersebut tidak terlalu diperhatikan. Kurangnya drainase bahkan tidak tersedianya drainase di kawasan permukiman Desa Bajo Tilamuta bukanlah hal yang serius bagi mereka karena intensitas banjir juga sangat rendah untuk kawasan permukiman Desa Bajo ini dan berdasarkan persepsi masyarakat Bajo, untuk hidup di atas laut tidak memerlukan adanya drainase.

Tabel 2. Sebaran Nilai Kekumuhan

Aspek	Indikator	Nilai			Hasil Untuk Desa Bajo	Nilai Untuk Desa Bajo
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang		
Lokasi	Legalitas Tanah	>66 %	66-33 %	<33 %	77.44% tidak memiliki sertifikat tanah	Sangat Tinggi
	Status Penguasaan Bangunan	>66 %	66-33 %	<33 %	22% tidak memiliki rumah sendiri	Sedang
	Frekuensi Bencana Kebakaran	>3 kali/th	3-1 kali/th	<1 kali/th	Hanya terjadi 1 kali, tahun 2012	Sedang
	Frekuensi Bencana Banjir	>3 kali/th	3-1 kali/th	<1 kali/th	Tidak pernah	Sedang
	Frekuensi Bencana Tanah Longsor	>3 kali/th	3-1 kali/th	<1 kali/th	Tidak pernah	Sedang
Kependudukan	Tingkat Kepadatan Penduduk	> 750 (KM); >500 (KB); >250 (KS)	750-500 (KM); 500-250 (KB); 250-150 (KS)	499-250 (KM); 249-150 (KB); 149-100 (KS)	63 jiwa/ha	Sedang
	Rata-rata Anggota Rumah	>8 jiwa/kk	8-6 jiwa/kk	<6 jiwa/kk	Mayoritas rata-rata 6 dan 7 jiwa/KK	Tinggi
	Jumlah KK per Rumah	> 4	3-4	1-2	93.03% untuk 1-2 KK per rumah	Sedang
	Tingkat Pertambahan Penduduk	>6 %	6 - 3 %	<3 %	2.58% per tahun	Sedang
	Angka Kematian Kasar	>6 %	6 - 3 %	<3 %	Angka kematian kecil	Sedang
	Status Gizi Balita	>66 %	66-33 %	<33 %	80% balita gizi baik	Sedang
	Angka Kesakitan malaria	>6 %	6-3 %	<3 %	8 jiwa terkena malaria 0.6%	Sedang
	Angka Kesakitan Diare	>6 %	6-3 %	<3 %	21 jiwa terkena diare 1.5%	Sedang
	Angka Kesakitan Demam Berdarah	>6 %	6-3 %	<3 %	1 jiwa terkena DBD 0.1%	Sedang
Kondisi Bangunan	Tingkat Kualitas Bangunan	>66 %	66-33 %	<33 %	Mayoritas (45.96%) rumah tidak permanen	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepadatan Bangunan	>66 %	66-33 %	<33 %	13 unit/ha	Sedang
	Tingkat Kelayakan Bangunan	>66 %	66-33 %	<33 %	75.21% tidak memenuhi luas minimal 36m ² dengan jenis material atap, lantai, dinding tidak memenuhi persyaratan standar	Sangat Tinggi
	Tingkat Penggunaan Luas Lantai	<3 m ² /org	3-5 m ² /org	>5 m ² /org	1.7m ² /org	Sangat Tinggi
Kondisi Prasarana dan Sarana Dasar	Tingkat Pelayanan Air Bersih	>66 %	66-33 %	<33 %	100% tidak tersedia air bersih (perpipaan)	Sangat Tinggi
	Kondisi Sanitasi Lingkungan	>66 %	66-33 %	<33 %	- Mayoritas rumah tangga tidak memiliki mck pribadi - Air limbah, tidak ada penanganan untuk greywater & black water	Sangat Tinggi
	Kondisi Persampahan	>66 %	66-33 %	<33 %	- Tidak tersedia TPS - Tidak ada petugas kebersihan - Mayoritas sampah dibuang kelaut	Sangat Tinggi
	Kondisi Saluran Air Hujan	>66 %	66-33 %	<33 %	Fungsi drainase 63% tidak baik, 75% tidak tersedia drainase	Sangat Tinggi
	Kondisi Jalan	>66 %	66-33 %	<33 %	45.13% aspal 46.24% semen paving blok	Tinggi
Kondisi Sosial Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	>66 %	66-33 %	<33 %	62.17% kebutuhan btm tercukupi	Tinggi
	Tingkat Pendidikan	>66 %	66-33 %	<33 %	45.68% SD 42.90 Patus SD	Tinggi
	Tingkat Pendapatan	>66 %	66-33 %	<33 %	751.000-1.000.000 (30.92%)	Sedang

Sumber: Dimodifikasi dari Draft Pedoman Umum Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya – Departemen PU (2014)

Kondisi persampahan dan air limbah di kawasan permukiman Desa Bajo juga masih dipengaruhi oleh karakter lokal dari masyarakat Bajo. Sampah-sampah yang dihasilkan tiap rumah tangga sebagian besar tampak berserakan dan menumpuk di sepanjang pesisir dan di permukaan laut

sekitar tempat tinggal mereka. Tidak adanya petugas kebersihan untuk mengangkut sampah di Desa Bajo dan tidak tersedianya TPS atau tempat pembuangan sampah sementara menambah buruknya kondisi pengelolaan sampah di kawasan permukiman Desa Bajo Talamuta.

Kondisi air limbah, tidak jauh berbeda atau SPM. Mayoritas greywater dibuang ke

Tabel 3a. Pembobotan Aspek Lokasi

Aspek	Indikator	Nilai			Hasil Untuk Desa Bajo	Nilai Untuk Desa Bajo	Range Nilai	Bobot
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang				
Lokasi	Legalitas Tanah	>66 %	66-33 %	< 33 %	77.44% tidak memiliki sertifikat tanah	Sangat Tinggi		5
	Status Penguasaan Bangunan	>66 %	66-33 %	< 33 %	22% tidak memiliki rumah sendiri	Sedang		1
	Frekuensi Bencana Kebakaran	>3 kali/th	3-1 kali/th	<1 kali/th	Hanya terjadi 1 kali, tahun 2012	Sedang		1
	Frekuensi Bencana Banjir	>3 kali/th	3-1 kali/th	<1 kali/th	Tidak pernah	Sedang		1
	Frekuensi Bencana Tanah Longsor	>3 kali/th	3-1 kali/th	<1 kali/th	Tidak pernah	Sedang		1
Total Bobot								9

Sumber: Dimodifikasi dari Draft Pedoman Umum Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya – Departemen PU (2014)

Tabel 3b. Pembobotan Aspek Kependudukan

Aspek	Indikator	Nilai			Hasil Untuk Desa Bajo	Nilai Untuk Desa Bajo	Range Nilai	Bobot
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang				
Kependudukan	Tingkat Kepadatan Penduduk	> 750 (KM); >500 (KB); >250 (KS)	750-500 (KM); 500-250 (KB); 250-150 (KS)	499-250 (KM); 249-150 (KB); 149-100 (KS)	63 jiwa/ha	Sedang		1
	Rata-rata Anggota Rumah Tangga	>8 jiwa/KK	8-6 jiwa/KK	<6 jiwa/KK	Mayoritas rata-rata 6 dan 7 jiwa/KK	Tinggi		3
	Jumlah KK per Rumah	>4	3-4	1-2	93,03% untuk 1-2 KK per rumah	Sedang		1
	Tingkat Pertambahan Penduduk	>6 %	6 – 3 %	<3 %	2.58% per tahun	Sedang		1
	Angka Kematian Kasar	>6 %	6 – 3 %	<3 %	Angka kematian kecil	Sedang		1
	Status Gizi Balita	>66 %	66 – 33 %	<33 %	80% balita gizi baik	Sedang		1
	Angka Kesakitan malaria	>6 %	6 – 3 %	<3 %	8 jiwa terkena malaria 0.6%	Sedang		1
	Angka Kesakitan Diare	>6 %	6 – 3 %	<3 %	21 jiwa terkena diare 1.5%	Sedang		1
	Angka Kesakitan Demam Berdarah	>6 %	6 – 3 %	<3 %	1 jiwa terkena DBD 0.1%	Sedang		1
	Total Bobot							

Sumber: Dimodifikasi dari Draft Pedoman Umum Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya – Departemen PU (2014)

Tabel 3c. Pembobotan Aspek Kondisi Bangunan

Aspek	Indikator	Nilai			Hasil Untuk Desa Bajo	Nilai Untuk Desa Bajo	Range Nilai	Bobot
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang				
Kondisi Bangunan	Tingkat Kualitas Bangunan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	Mayoritas (45.96%) rumah tidak permanen	Sangat Tinggi		5
	Tingkat Kepadatan Bangunan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	13 unit/ha	Sedang		1
	Tingkat Kelayakan Bangunan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	75.21% tidak memenuhi luas minimal 36m ² dengan jenis material atap, lantai, dinding tidak memenuhi persyaratan standar	Sangat Tinggi		5
	Tingkat Penggunaan Luas Lantai	<3 m ² /org	3-5 m ² /org	>5 m ² /org	1.7m ² /org	Sangat tinggi		5
Total Bobot								16

Sumber: Dimodifikasi dari Draft Pedoman Umum Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya – Departemen PU (2014)

dengan kondisi persampahan. Tidak ada separasi antara *greywater* dan *blackwater* sesuai tuntutan standar pelayanan minimal

laut, sedangkan untuk *blackwater* ada yang membuangnya di tanah dengan cara mengubur dan ada juga yang langsung

Tabel 3d. Pembobotan Aspek Kondisi Prasarana dan Sarana Dasar

Aspek	Indikator	Nilai			Hasil Untuk Desa Bajo	Nilai Untuk Desa Bajo	Range Nilai	Bobot
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang				
Kondisi Prasarana dan Sarana Dasar	Tingkat Pelayanan Air Bersih	>66 %	66 – 33 %	<33 %	100% tidak tersedia air bersih (perpipaan)	Sangat Tinggi		5
	Kondisi Sanitasi Lingkungan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	- Mayoritas rumah tangga tidak memiliki mck pribadi - Air limbah, tidak ada penangan untuk greywater & black water	Sangat Tinggi		5
	Kondisi Persampahan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	- Tidak tersedia TPS - Tidak ada petugas kebersihan - Mayoritas sampah dibuang kelaut	Sangat Tinggi		5
	Kondisi Saluran Air Hujan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	Fungsi drainase 63% tidak baik, 75% tidak tersedia drainase	Sangat Tinggi		5
	Kondisi Jalan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	45.13% aspal, 46.24% semen paving blok	Tinggi		3
Total Bobot								23

Sumber: Dimodifikasi dari Draft Pedoman Umum Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya – Departemen PU (2014)

Tabel 3e. Pembobotan Aspek Kondisi Sosial Ekonomi

Aspek	Indikator	Nilai			Hasil Untuk Desa Bajo	Nilai Untuk Desa Bajo	Range Nilai	Bobot
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang				
Kondisi Sosial Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	62.17% kebutuhan blm tercukupi	Tinggi		3
	Tingkat Pendidikan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	45.68% SD, 42.90 Putus SD	Tinggi		3
	Tingkat Pendapatan	>66 %	66 – 33 %	<33 %	751.000-1.000.000 (30.92%)	Sedang		1
Total Bobot								7

Sumber: Dimodifikasi dari Draft Pedoman Umum Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya – Departemen PU (2014)

membuangnya di laut karena masih terbiasa hidup dengan budaya tradisional mereka. Dimana hal tersebut tanpa sepengetahuan mereka, dapat mengancam ekosistem laut serta tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk sebuah kawasan permukiman.

Kondisi jalan di kawasan permukiman Desa Bajo tergolong tinggi untuk indikator kekumuhan karena sekitar 55% belum di aspal dan beberapa bagian mulai berlubang sehingga disaat hujan air tergenang. Jalan bukan merupakan hal yang terlalu penting untuk masyarakat Bajo karena karakter lokal masyarakat Bajo yang sebagian besar melakukan kegiatan sehari-harinya di atas laut.

Kondisi Bangunan Hunian

Pola bermukim masyarakat Bajo di atas air merupakan faktor penyebab kekumuhan yang terjadi di kawasan permukiman Suku Bajo di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta. Rumah-rumah yang tidak teratur, berdekatan

dekatan tanpa jarak, dan sebagian besar merupakan rumah non permanen karena unsur tradisional dari Suku Bajo ini, membuat kawasan permukiman tersebut terlihat kumuh. Suku Bajo Talamuta nampaknya sudah jauh dari prinsip kearifan lokal yang diemban oleh leluhur mereka yakni menjaga kekayaan laut dan keberlangsungan ekosistem laut. Terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan indikator-indikator kumuh terdapat dalam kawasan permukiman pesisir tradisional Suku Bajo Talamuta.

Pada hakekatnya, Suku Bajo memiliki tradisi yang sudah dipegang teguh oleh para leluhur yakni antara lain dilarang membuang ke perairan laut seperti, air cucian teripang, arang kayu atau abu dapur, puntung dan abu rokok, air cabai, jahe dan air perasan jeruk, dan larangan mencuci alat memasak (wajan) di perairan laut. Tradisi tersebut merupakan pantangan bagi Suku Bajo, yang memiliki tujuan sangat baik untuk tetap menjaga kelestarian laut walaupun mereka hidup dan

tinggal di laut. Namun hal ini tidak terlihat lagi di kawasan permukiman Desa Bajo Talamuta. Hal yang menjadi tradisi tersebut yang tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem laut dan kelestarian pesisir laut, berbanding terbalik dengan keadaan Desa Bajo Talamuta. Ditunjukkan dengan dengan teridentifikasi faktor-faktor kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Talamuta.

Tradisi yang di emban para leluhur, mulai memudar sedikit demi sedikit, karena aspek modernitas yang mulai masuk di kawasan permukiman Desa Bajo Talamuta. Kearifan lokal Suku Bajo dalam menjaga kelestarian pesisir dan laut, kini tinggal menjadi sebuah semboyan mulia yang tergerus oleh modernitas sehingga kekumuhan tidak terhindarkan lagi. Memperhatikan, laut yang dulunya disakralkan Suku Bajo dan menjadi andalan satu-satunya bagi Suku Bajo baik sebagai tempat tinggal hingga ladang untuk mencari ikan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Bajo, kini terkesan hanya sebagai hal yang biasa saja atau tidak sesakral dulu.

Kawasan permukiman masyarakat Bajo dengan tipologi sebagai permukiman kumuh dan permukiman kumuh di atas air menjadikan kawasan permukiman ini lebih khusus dalam penanganannya karena karakter dari pola bermukim mereka yang dari dulunya sudah tinggal di atas air, dan kebiasaan masyarakat Bajo yang tinggal berdekatan sebagai cara memperkuat hubungan sosial mereka

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo :
 - a. Lokasi
 - b. Kependudukan
 - c. Kondisi Bangunan Hunian
 - d. Kondisi Prasarana dan Sarana Dasar
 - e. Kondisi Sosial Ekonomi
2. Faktor-faktor dominan penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo adalah sebagai berikut :
 - a. Kondisi Prasaran dan Sarana Dasar
 - b. Kondisi Bangunan Hunian

Kedua faktor tersebut dikatakan sebagai faktor dominan karena berdasarkan analisis skoring memiliki bobot tertinggi sebagai nilai kekumuhan berdasarkan indikator yang ada, dan berdasarkan karakter lokal masyarakat Bajo di kawasan permukiman Desa Bajo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir. 2007. Model Komunikasi Pembangunan Dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan Di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Desa Morodemak dan Purwosari Kabupaten Demak). Semarang: UNDIP
- Auliannisa, D. 2009. Permukiman Kumuh Di Kota Bandung. Depok: Universitas Indonesia
- Doxiadis, Constantinos A. 1968. An Introduction To The Science Of Human Settlements-Ekistics. London: Hutchinson of London
- Ikhsani, FW. 2011. Optimasi Pengelolaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu Macan pada Kelompok Sea Farming di Pulau Panggang, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Bogor: IPB Press
- Kartiko, Restu. 2010. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kay, R dan J, Alder. 1999. Coastal Planning and Management. London: E&FN Spon
- Supriharyono. 2007. Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Artikel Dari Majalah Internet

1. Majalah Sains Indonesia Edisi 10. Oktober 2012. [Rumah Suku Bajo Tak Gentar Hadapi Ombak, Angin, dan Gempa](#). Bogor : PT. Sarana Komunikasi Utama
2. http://www.sainsindonesia.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=306:rumah-suku-bajo-tak-gentar-hadapi-ombak-angin-dan-gempa&catid=29&Itemid=134
3. [11 Mei 2014, 8.27 pm]

Data Peraturan / Laporan Pemerintah

1. Buku Profil Desa Bajo Tahun 2013
(Sekertaris Desa Bajo, Kantor Desa Bajo)
2. Draft Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2014
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman